

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Abdul Kadir Adys, *Sistem Hukum dan Negara Hukum: Telaah Kritis Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2019).
- Akbar Saleh Sope, *Buku Ajar Perpajakan: Konsep dan Teori*, (Malang, Kramantara Jaya Sentosa, 2025).
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Adrianto Dwi Nugroho, *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Alexander Thian, *Perpajakan I*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2022).
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).
- Bunyamin, dkk, *Ilmu Hukum*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2000).
- F.X. Adji Samekto, *Penelitian Hukum dalam Aliran Legal Positivisme*, (Depok: Rajawali Press, 2023).
- Gania Fasya, dkk, *Hukum Pajak*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023).
- Gatot S.M. Faisal, *How To Be A Smarter Taxpayer (Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Lebih Cerdas)*, (Jakarta: Grasindo, 2009).
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2018).
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LeksBang PRESSindo, 2010).
- Jarot Digjo Ismoyo, dkk, *Teori Negara Hukum Modern*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2019).
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*, (Malang: Setara Press, 2012).
- Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003).
- Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Material (Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),
- Muhammad Awal Satrio Nugroho dan Bambang Teguh, *Hak dan Kewajiban dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Muhammad Hasyim Aneboa, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).
- Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019).
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 1994).
- Rachmat Soemirto dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Ridwan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Rudini Hasyim Rado, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022).
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1995).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Sigit Hutomo, *Pajak Penghasilan: Konsep & Aplikasi*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009).
- Soemarso, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Jakarta : Salemba Empat, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2002).
- Sri Sudyatmoko, *Pengadilan Pajak dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2010).
- Syah Abadi Mendrofa, dkk, *Perpajakan Indonesia*, (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2025).
- Teguh Prasetyo, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermanfaat)*, (Bandung: Nusa Media, 2019).
- Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru)*, (Jakarta: Permata Putri Media, 2010).
- Triana Zuhrotun Aulia, dkk, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Banten: Minhaj Pustaka:2025).
- Weriantoni dan Wenti Sri Novita, *Ekonomi Perpajakan*, (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2024).
- Widodo Dwi Putro, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023).
- Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Material I: Seri Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 5*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ahmad Mathar, “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, Edisi 2 (2023).

- Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, “Kepastian Hukum Kewajiban Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Notaris Selaku Pengusaha Kena Pajak”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 4, No. 1 (2023).
- Annisa Febrianda, dkk, “Subjek dan Objek Pajak Penghasilan”, *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, Vol. 02 No. 04, (2024).
- Desy Putri Aldina, “Perpajakan atas Jasa Profesi Notaris: Kepastian Hukum dan Perlindungan Profesi dalam Perspektif Hukum Pajak”, *Yustitia Tirtayasa*, Vol. 5, No. 4, (2025).
- Elan Nora, “Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat”, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2023).
- Elmar Prima F. Baeha dan Afner Asianta Ginting, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau dari Undang Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 2 (2023).
- Gabrila Christy Mumek dan Wasis, “Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia Dan Implikasinya Kepada Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol.1, No. 4 (2022).
- Marilang, Nilai Keadilan sosial dalam Pertambangan, Disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana UNHAS), 2010.
- Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, Vol. 23, No. 2, (2021).
- Mohd. Yusuf DM, dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No.4 (2025).
- M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 04, No. 01, (2013).
- M Sahib Saesar Anugrah dan Primandita Fitriandi, “Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior”, *Jurnal Info Artha*, Vol. 6, No. 1 (2022).
- Muhammad Tahir Laming, “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan”, *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Naufal Akbar Kusuma Hadi, “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2 (2022).

- Nur Ainiyah Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium”, *Recidive*, Vol. 2, No. 1, (2013).
- Rizki Puspawati dan Satia Nathanea Cahyani, “Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Indigenous Knowledge*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Su’adah dan Moh. Faisol, “Potret Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Profesi Notaris”, *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, (2024).
- Thomas Abbon, “Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Pajak Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Tô-râ*, Vol. 5, No. 1, (2019).
- Wulan Damayanti, dkk, “Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Notaris Yang Termasuk Pengusaha Kena Pajak”, *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, No. 3 (2024).
- Yohanes Suhardin, “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.2 (2023).

C. Internet

<https://www.pajak.go.id/id/Notaris> diakses pada 25 April 2025 Pukul 21.20 WIB.

<https://klikpajak.id/blog/tindak-pidana-perpajakan/> diakses pada 01 Juni 2025 Pukul 22.10 WIB.

<https://kbbi.web.id/konsekuensi> diakses pada 23 April 2026 Pukul 09.41 WIB.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/menilik-kekhususan-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-bidang-perpajakan> diakses pada 30 April 2026 pukul 00.17 WIB.

<https://pajak.go.id/panduan-layanan-pajak/konten/layanan-digital/2025/pengawasan/surat-wajib-pajak/surat-tanggapan-atas-surat-permintaan-penjelasan-data-dan-keterangan-%28sp2dk%29> diakses pada 30 April 2026 Pukul 00.34 WIB.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/penegakan-hukum-pidana-di-bidang-perpajakan> diakses pada 30 April 2026 Pukul 10.27 WIB.

<https://www.pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak> diakses pada 12 Mei 2026 Pukul 11.57 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.